



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIK PRASETYA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 892326

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/300 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 232 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 806.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOTOR, HONDA GL 15 A1RR MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, YAMAHA B04 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N2 6L2 AT Tahun 2018, HADIAH Rp. 7.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
6. MOTOR, YAMAHA ALVA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
7. MOTOR, SUZUKI 000 Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
8. MOBIL, SUZUKI SEDAN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.703.497.422
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.611.997.422
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.611.997.422

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.